

Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Koperasi untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa di Cibinong Bogor

Rudy Rahwana

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kalpataru

Cibinong Bogor, Indonesia

Korespondensi penulis: rudymuhammad76@gmail.com

Abstract. *This research was conducted to obtain information related to the ability of cooperative management to be able to optimize the scale of cooperative business, through efficient, productive and rational capital allocation; utilization of business capacity and cooperative capital; cooperation with various parties, both in the form of business, capital and cooperative management in general; and fertilization of own capital, through member savings and the formation of reserve funds. To achieve the above optimization, the stigma of "Cooperative as an association of people not an association of capital" should be removed, which is often considered as one of the factors causing the failure of cooperative financial management. Of course, this is a tough task for cooperative managers in carrying out their cooperative business activities, but with the capacity of the management that continues to be fostered and upgraded in knowledge and abilities, to achieve maximum cooperative goals.*

Keywords: *cooperative, optimization, financial management.*

Abstrak. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait kemampuan pengurus koperasi untuk dapat melakukan optimalisasi terhadap skala usaha koperasi, melalui alokasi modal yang efisien, produktif dan rasional; pemanfaatan kapasitas usaha dan modal koperasi; kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam bentuk usaha, permodalan maupun manajemen koperasi secara umum; dan pemupukan modal sendiri, melalui simpanan-simpanan anggota dan pembentukan dana cadangan. Untuk mencapai optimalisasi di atas, maka sudah seharusnya stigma tentang "Koperasi sebagai perkumpulan orang bukan perkumpulan modal" yang ternyata seringkali itu dianggap sebagai salah satu faktor penyebab gagalnya manajemen keuangan koperasi dapat dihapuskan. Tentu saja hal ini menjadi tugas yang berat bagi pengelola koperasi dalam menjalankan aktivitas usaha koperasinya tersebut, namun dengan kapasitas pengurus yang terus dibina dan diupgrade pengetahuan serta kemampuannya, untuk tercapainya tujuan koperasi secara maksimal.

Kata kunci: koperasi, optimalisasi, manajemen keuangan.

LATAR BELAKANG

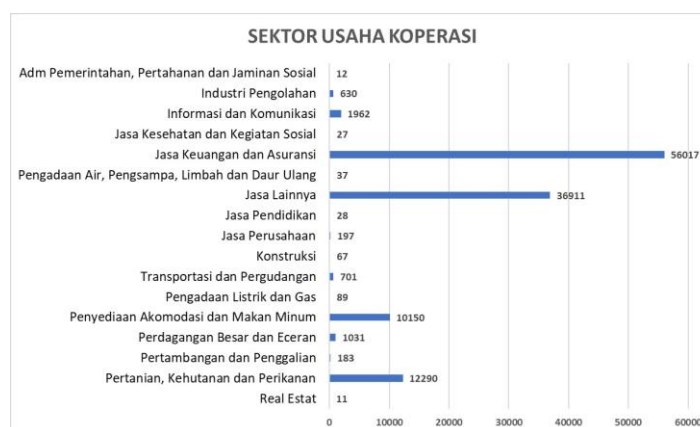
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempatkan Koperasi sebagai bentuk usaha yang terus dikembangkan karena menyentuh masyarakat bawah dan juga memiliki kesesuaian dengan kultur budaya nusantara. Koperasi diharapkan berkembang karena dianggap sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yaitu kebersamaan serta gotong royong. Kemandirian koperasi sangat diharapkan sehingga koperasi menjadi usaha yang mampu berdiri sendiri menjalankan kegiatan usahanya secara mandiri, mampu memperoleh laba sehingga dapat mempertahankan kelangsungan usaha usahanya serta meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2020-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah menempatkan serta menekankan targetnya pada pembangunan struktur ekonomi yang kuat dengan landasan keunggulan kompetitif wilayah serta dukungan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan

daya saing. Tujuh target agenda nasional untuk pembangunan yang masuk dalam program yang diprioritaskan, salah satunya adalah meningkatkan kekuatan atau ketahanan secara ekonomi agar dapat tumbuh dengan kualitas dan adil. Koperasi dan UMKM terus menjadi perhatian pemerintah dan dikembangkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi, hal ini dimaknai secara lebih dalam bahwa koperasi mampu menjadi cerminan implementasi pemberdayaan sistem ekonomi kerakyatan yang berdasarkan Pancasila.

Dalam beberapa periode pemerintahan, Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia terus melakukan reformasi total terhadap perkoperasian di Indonesia dengan berbagai dinamika didalamnya. Salah satu hasilnya terjadi peningkatan sumbangan Produk Domestik Bruto-PDB koperasi terhadap Produk Domestik Bruto-PDB nasional meningkat 1,11% dari Tahun 2016 ke Tahun 2018 (Kemenkop, 2020). Juga berdampak kepada tercapai anggota koperasi dan masyarakat yang sejahtera dan diharapkan juga akan mampu meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Peningkatan kapasitas koperasi dicerminkan melalui jumlah volume usaha koperasi yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selain itu juga terjadi kenaikan prosentase jumlah anggota koperasi aktif sebanyak 89,69% (10.621.323 orang) dari tahun 2016 ke tahun 2019 (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2020).

Berdasarkan sektor usaha, perkembangan jenis usaha koperasi di Indonesia dapat kita lihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Sektor Usaha Koperasi Indonesia
Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM, 2020.

Kementerian Koperasi dan UMKM juga telah mendalami fenomena ketidakaktifan pada banyak koperasi, data menunjukkan adanya 40.013 unit koperasi telah bubar dan atau dibubarkan. Koperasi tersebut teridentifikasi sudah tidak lagi aktif, atau tidak menyelenggarakan rapat anggota tahunan untuk waktu 3 tahun atau usaha koperasi tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Kendala pengelolaan keuangan lainnya antara lain lahan

koperasi yang tidak berkembang dan mengalami defisit serta masih belum optimalnya pemberdayaan anggota koperasinya sendiri. Diluar penyebab tersebut terdapat masalah yang menjadi sebab musabab lain yaitu : (1) motivasi yang salah saat mendirikan koperasi hanya bertujuan untuk mengharapkan bantuan dari pemerintah (2) adanya kesalahpahaman dalam pengurusan koperasi, penggunaan koperasi untuk kepentingan pribadi pengurus; (3) kompetensi sumber daya manusia dan komitmen baik pengurus maupun pembina koperasi yang masih terbatas (Kemenkopukm, 2020). Permasalahan kelemahan pengelolaan keuangan koperasi lainnya berupa keterlambatan penyusunan laporan keuangan dan ketidakjelasan perlakuan akuntansi (Krisnadewi dkk, 2017). Salah satu cara untuk mengurangi munculnya kesalahpahaman dalam pengurusan koperasi antara pengurus, anggota dan badan pengawas adalah dengan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Perangkat penting dalam organisasi utama koperasi tentu saja pengurus, rapat anggota dan badan pengawas. Sementara, kuasa tertinggi sebuah koperasi terdapat pada Rapat Anggota. Hasil rapat anggota dilaksanakan oleh pengurus koperasi, pengawas berperan untuk memastikan pengurus melaksanakan kegiatannya sesuai dengan hasil rapat anggota yang diamanahkan. Maka disini pengurus menjadi pihak yang dituntut untuk paling aktif dalam kegiatan usaha koperasi, karena pengurus lah yang terlibat secara langsung dalam kegiatan keseharian operasional koperasi. Oleh karena itu, komitmen yang kuat serta kemampuan pengurus koperasi yang handal tentu sangat diharapkan sehingga kemudian mereka dapat memajukan koperasi.

Pengelolaan keuangan menjadi salah satu hal penting untuk diperhatikan oleh pengurus koperasi. Secara garis besar, tanggung jawab pengelolaan keuangan mulai dari penyusunan anggaran sampai dengan penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas telah diamanahkan secara khusus dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu dalam Pasal 30 Ayat 1 (satu) yaitu Pembangunan dan pengembangan koperasi sebagai badan usaha yang juga berperan sebagai penggerak ekonomi rakyat, maka koperasi harus dikelola dengan prinsip terbuka, transparan dan akuntabel. Hal tersebut dapat terwujud salah satunya melalui penyelenggaraan akuntansi secara benar dan tertib.

Di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor terdapat 186 koperasi, terdiri dari 85 koperasi yang masih aktif dan 101 yang sudah tidak aktif. Dari hasil penelusuran dengan beberapa koperasi yang masih aktif ditemukan bahwa saat ini ada masalah yang dihadapi yaitu pengelolaan keuangan yang masih perlu dioptimalkan, khususnya untuk usaha simpan pinjam. Koperasi baru sebatas menggunakan aplikasi Microsoft Office (MS Excel) untuk melakukan pencatatan transaksi hariannya namun belum terintegrasi dengan sistem pelaporan keuangan.

Koperasi juga hanya memiliki informasi terbatas terkait keuangan berupa laporan kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan saja, belum menyusun laporan keuangan secara lengkap sesuai aturan kaidah akuntansi. Sehingga salah satu kelemahan yang timbul adalah tidak dapat diperolehnya informasi keuangan yang lengkap dan komprehensif. Selain itu, selama ini koperasi melakukan pengembangan usaha koperasi belum berdasarkan atas data keuangan, sehingga potensi risiko likuiditas dan estimasi profitabilitas usaha belum dapat ditaksir dengan optimal. Hal ini tentu saja dikhawatirkan akan berdampak pada pengembangan usaha di masa yang akan datang, sehingga kemudian tidak mampu untuk bertahan lama.

Permasalahan utama koperasi-koperasi yang ada di Kecamatan Cibinong dengan status masih berkembang pada umumnya yaitu terkait pengelolaan keuangan yang belum secara maksimal. Permasalahan pengelolaan keuangan yang tidak akuntabel dan transparan bisa saja menjadi salah satu pemicu ketidakharmonisan hubungan pengurus dengan anggota. Koperasi yang memiliki pengelolaan keuangan yang baik akan sangat membantu pengurus pada saat mempertanggungjawabkan kegiatan koperasi baik kepada anggota maupun kepada stakeholder lainnya dan operasional koperasi oleh pengurus. Salah satu hasil dari administrasi pengelolaan keuangan koperasi tentunya berupa laporan keuangan atas aktivitas koperasi selama satu tahun takwim. Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai dasar bagi anggota untuk melakukan evaluasi terhadap pengurus dan untuk mengusulkan rencana pengembangan usaha koperasi tahun selanjutnya. Dari sisi Badan Pengawas, laporan keuangan koperasi juga merupakan dasar untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab dan kegiatan operasional koperasi yang dijalankan oleh pengurus selama satu tahun yang telah lewat.

Beberapa masalah yang dihadapi koperasi-koperasi di Kecamatan Cibinong Bogor adalah masih terbatasnya kemampuan dalam pengelolaan keuangan khususnya administrasi keuangan yang terintegrasi ke laporan keuangan untuk usaha koperasi. Permasalahan ini berdampak kepada proses pengelolaan keuangan yang belum optimal, perlu waktu yang lebih banyak dan data keuangan yang tidak *up to date* setiap waktu. Koperasi diharapkan mampu membantu mengontrol serta menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, dengan pertimbangan kondisi ekonomi anggota cenderung turun pasca wabah pandemi Covid 19. Oleh karenanya perkembangan Koperasi bukan hanya menjadi tanggung jawab dari Kementerian Koperasi dan UMKM saja, akan tetapi jadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat juga. Kontribusi dari berbagai pihak termasuk dari kalangan akademisi untuk berperan aktif tentu sangat dibutuhkan dalam memberikan pembinaan dan pendampingan terhadap koperasi sehingga mampu meningkatkan kompetensi sumber daya terutama pengurus.

KAJIAN TEORITIS

Koperasi sebagaimana yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari secara khusus dibahas dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Dijelaskan lebih lanjut bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Dari beberapa pengertian koperasi yang di jelaskan maka dapat dipahami bahwa koperasi adalah:

1. Kumpulan orang, bukan kumpulan modal.
2. Koperasi adalah perusahaan.
3. Memberikan pelayanan kepada anggota.

Koperasi merupakan badan usaha yang dimiliki secara bersama-sama dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, menjaga kerukunan antar sesama, bekerja untuk kepentingan bersama. Koperasi lebih menekankan pada paham kooperativisme (*cooperation based*) yang akan membentuk kekuatan yang berlipat ganda, bersinergi dalam rangka mencapai efisiensi.

Paul Hubert Casselmen dalam bukunya *The Cooperative Movement and some of its Problems* mengatakan bahwa: *Cooperation is an economic system with social contrast.*” Dari defenisi *Cooperation is an economic system with social contrast*, oleh Casselmen yang telah dikutip di atas, koperasi mengandung dua unsur, yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial. Koperasi merupakan satu sistem, dan sebagaimana diketahui bahwa sistem itu merupakan himpunan komponen-komponen atau bagian yang saling berkaitan yang secara bersama-sama berfungsi mencapai tujuan.

Pemberdayaan masyarakat dapat di pandang sebagai suatu jembatan bagi konsep-konsep pembangunan makro dan mikro. Dalam kerangka pemikiran tersebut berbagai input seperti dana, prasarana dan sarana yang dialokasikan kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan harus di tempatkan sebagai suatu rangsangan dalam memacu percepatan sosial ekonomi masyarakat. Proses ini kemudian diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat (*capacity building*) melalui pemupukan modal yang bersumber dari surplus yang di hasilkan dan pada gilirannya dapat menciptakan pendapatan yang dinikmati

oleh masyarakat. Dengan demikian, proses transformasi itu harus digerakkan oleh masyarakat sendiri.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut; Pertama, upaya itu harus terarah. Kedua, program ini harus langsung mengikut sertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang di hadapinya.

Dengan pemikiran seperti dijelaskan diatas, maka kemudian koperasi dapat menjadi instrument yang sangat potensial dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Argumen penting untuk menguatkan pernyataan tersebut diantara lain seperti yang disampaikan sebelumnya, Menteri Negara Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasanpada yang menegaskan koperasi dan UMKM memiliki peran strategis yang berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan rakyat adalah nyata. Kedua lembaga ini juga telah terbukti mampu menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam kondisi seberat apapu. Faktanya sesuai data terhadap dampak positif atas perkembangan Koperasi dan UMKM, terutamanya dalam penyerapan tenaga kerja sektor Koperasi menampung sekitar 23,39%, sektor UMKM yang berjumlah sekitar 51,2 juta unit usaha atau 99,98% dari total pelaku ekonomi nasional, kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai 97,04% dari total tenaga kerja yang terserap.

Manajemen keuangan mengandung pengertian mengelola uang perusahaan sedemikian rupa sehingga dapat dicapai persediaan kas maksimum dari uang tunai yang menganggur. Sedangkan likuiditas berasal dari kata likuid yang mempunyai arti cair atau lancar yaitu cairnya aktiva menjadi uang tunai tanpa mengurangi nilainya. Bagi perusahaan alat-alat ini harus cukup tersedia untuk memenuhi kewajiban intern ataupun ekstern sehingga kelangsungan hidup perusahaan dapat terjamin. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih.” (Munawir, 2004: 31)

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam pelaksanaan penelitian ini adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Selain studi literatur juga dilakukan penggalian serta penelaahan data-data melalui berbagai media serta pusat data pada institusi yang ada untuk mendukung

hasil observasi di lapangan. Penelitian dilakukan di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan sekitarnya, dengan berfokus pada bagaimana kondisi koperasi yang berada di wilayah tersebut dalam hal pengelolaan keuangannya.

Sasaran informan untuk menggali informasi pada penelitian ini adalah 25 (dua puluh lima) koperasi di wilayah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Data yang dihasilkan dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam manajemen Koperasi di seluruh Indonesia, terdapat tiga unsur utama atau perangkat organisasi Koperasi, yaitu rapat anggota, pengurus dan badan pengawas. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi, sementara pengurus merupakan pemegang amanah hasil rapat anggota, dan badan pengawas sebagai pihak yang bertugas mengawasi pengurus dalam menjalankan amanah rapat anggota. Dari ketiga unsur manajemen Koperasi ini, pengurus menjadi unsur yang paling memegang peranan bila dibandingkan dengan dua unsur lain.

Oleh karena itu pengurus koperasi haruslah mereka yang memiliki kemampuan, kapasitas serta komitmen yang tinggi dalam upaya memajukan Koperasi. Manajemen pengelolaan koperasi merupakan proses kolektif dari tahapan-tahapan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi. Secara khusus manajemen koperasi ditata dalam upaya pencapaian tujuan melalui suatu proses mengatur, memimpin dan mengendalikan segala unsur-unsur yang terdapat dalam koperasi.

Sebagai sebuah badan usaha Koperasi harus dikelola secara profesional, sehingga pengurus yang mendapat amanah dari anggota untuk menjalankan aktivitas organisasi dan usaha Koperasi perlu memiliki kemampuan mumpuni termasuk pengetahuan yang luas mengenai cara pengelolaan Koperasi. Salah satunya adalah dalam pengelolaan keuangan atau permodalan. Hal ini sesuai dengan tugas pengurus sebagaimana dinyatakan dalam Ayat 1 Pasal 30 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, antara lain yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan adalah:

- 1) Mengelola Koperasi dan usahanya;
- 2) Mengajukan rencana kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja Koperasi (RAPBK);

- 3) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.

Mengingat bahwa karakteristik badan usaha koperasi berbeda dengan karakteristik badan usaha lainnya, maka tentunya sistem manajemen serta pengelolaan keuangan di dalam organisasi koperasi pun mempunyai karakteristik tertentu. Oleh karena itu, untuk dapat memahami karakteristik dari sistem pembukuan dan keuangan usaha koperasi, maka harus terlebih dulu dapat memahami dengan baik mengenai bagaimana karakteristik badan usaha koperasi. Dengan pemahaman terhadap karakteristik koperasi dan prinsip-prinsip koperasi, maka pengurus akan dapat memahami prinsip-prinsip keuangan yang khusus untuk sebuah badan usaha koperasi seperti yang tercantum dalam standar akuntansi yang khusus dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Namun meskipun karakteristik koperasi memiliki kekhususan, secara umum manajemen keuangan koperasi tetap berlandaskan pada prinsip bagaimana mengelola kas dengan tepat. Kas sangat berperan dalam kelancaran kegiatan usaha dan terhadap kas pula terdapat ketergantungan akan keberlanjutan dari perusahaan termasuk didalamnya adalah koperasi. Oleh karena itu, kas harus dikelola dengan baik dari segi penerimaan maupun dari segi pengeluarannya, dalam hal ini adalah kas dalam perusahaan yang selalu berputar yaitu berupa arus kas masuk (*cash in flow*) dan arus kas keluar (*cash out flow*). Untuk menjaga keseimbangan arus kas pada koperasi dapat dilakukan dengan adanya suatu pengelolaan kas dengan manajemen keuangan yang tepat, untuk bisa mengukur prestasi suatu perusahaan. Karena selain dengan berbagai perbandingan tingkat rasio keuangan, tingkat laba, dan jaminan kesejahteraan karyawan, prestasi perusahaan juga dapat ditunjukkan dengan adanya manajemen keuangan yang berimbang.

Salah satu tugas penting yang dilakukan oleh pengurus koperasi setelah akhir tahun adalah membuat serta menganalisis laporan keuangan koperasi dengan tujuan menggali informasi yang lebih luas dan mendalam dari laporan keuangan. Laporan Keuangan yang dibuat oleh koperasi sejatinya merupakan media informasi yang merangkum semua aktivitas pelaksanaan kegiatan arus lalu lintas keuangan koperasi selama satu tahun. Sementara Analisis Laporan Keuangan merupakan suatu perwujudan dari aplikasi tehnik sekaligus pengukuran untuk laporan keuangan yang telah dibuat dan bertujuan untuk memantau data-data yang berkaitan keuangan untuk menghasilkan kesimpulan hasil kinerja pengurus koperasi pada periode tertentu sehingga dapat dimanfaatkan bagi penyusunan strategi koperasi dimasa yang akan datang.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Munawir (2004), ada dua metode analisis yang dapat digunakan untuk melakukan analisa terhadap laporan keuangan koperasi yang telah dibuat, yaitu :

1. Analisis Horizontal dimana dilakukan analisis dengan melakukan studi perbandingan antar laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat, sehingga akan diketahui seperti apa perkembangan koperasi dalam periode tersebut.
2. Melakukan Analisis Vertikal yaitu melakukan analisis yang hanya berfokus pada satu periode atau satu saat saja, dengan membandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya dalam laporan keuangan koperasi.

Seperti yang disampaikan dalam teori kinerja menurut Jumingan (2006), kinerja merupakan suatu gambaran dari prestasi yang dicapai koperasi dalam kegiatan operasionalnya baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dana dan penyaluran dana, aspek teknologi, maupun dari aspek sumber daya manusia. Sehingga kemudian dari hasil kinerja tersebut dapat dilakukan pengukuran terhadap rasio-rasio yang dihasilkan berikut :

- a) *Liquiditas* merupakan pengukuran kemampuan dari koperasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau kemampuan dari koperasi untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat dilakukan penagihan.
- b) *Aktivitas* didefinisikan sebagai pengukuran sejauh mana efektivitas koperasi dalam penggunaan aset dengan melihat tingkat aktivitas aset.
- c) *Solvabilitas* yaitu melihat dari cara mengukur sejauh mana kemampuan koperasi memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya
- d) *Profitabilitas* dimana lebih berfokus kepada pengukuran dari seberapa kemampuan koperasi menghasilkan laba (Sisa Hasil Usaha)

Keempat tugas pengurus yang terkait dengan manajemen keuangan di atas menunjukkan bahwa mengelola keuangan sebuah koperasi sangat terkait dengan keseluruhan aktivitas yang ada dalam koperasi itu sendiri. Dalam hal ini manajemen keuangan koperasi merupakan bagian dari manajemen koperasi, yang dalam prakteknya dijalankan oleh pengurus dan diawasi oleh badan pengawas dan anggota. Pengawasan oleh anggota dipandang sebagai sebuah bentuk pengawasan yang paling efektif, hal ini dikarenakan identitas ganda yang dimiliki oleh anggota, yaitu sebagai pemilik koperasi sekaligus juga sebagai pengguna jasa/layanan koperasi.

Sebagai pemilik koperasi, seluruh anggota memiliki keterikatan dan kewajiban serta kepentingan dalam mengawasi jalannya usaha koperasi. Oleh karena itu pengawasan dari anggota akan lebih efektif bila dibandingkan dengan pengawasan oleh badan pengawas, karena para anggotalah yang merasakan pelayanan yang diberikan koperasi sehingga dapat langsung merasakan bagaimana baik atau tidaknya perjalanan usaha koperasi. Anggota dapat merasakan

apakah kinerja pengurus koperasi sudah sesuai dengan amanah rapat anggota atau justru menyimpang dari amanah.

Manajemen keuangan koperasi sebagai bagian penting dari manajemen koperasi secara keseluruhan, sangat terkait sekali dengan masalah kesejahteraan anggota. Hal itu tentunya sangat sejalan dengan tujuan normatif manajemen keuangan yaitu meningkatkan kemakmuran para pemilik. Dalam hal ini, manajemen keuangan koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota yang juga merupakan tujuan utama dari pendirian organisasi koperasi itu sendiri. Salah satu tugas pengurus koperasi yaitu mengelola aktivitas koperasi dan usahanya, tugas ini sangat terkait dengan masalah manajemen keuangan dalam koperasi, karena dalam menjalankan koperasi dan usahanya diperlukan permodalan atau pembiayaan yang mumpuni untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut. Kesalahan yang dibuat pengurus dalam menjalankan usaha akan berakibat fatal dan bahkan berkepanjangan, oleh karena itu agar jalannya usaha koperasi sesuai dengan tujuan koperasi maka diperlukan kecakapan, kapasitas serta kerjasama dari semua unsur yang ada dalam koperasi, mengingat unsur-unsur perangkat organisasi Koperasi merupakan satu kesatuan yang akan menentukan kemajuan koperasi.

Dalam hal manajemen keuangan koperasi diatas, terdapat beberapa hal penting yang menjadi bagian dari kapasitas pengurus koperasi antara lain:

- a) Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, minimal fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), implementasi (*actuating*) dan fungsi pengendalian (*controlling*).
- b) Kegiatan pencarian dana, terkait bagaimana mengelola aktivitas untuk memperoleh atau mendapatkan dana/modal, baik yang berasal dari dalam maupun luar koperasi.
- c) Kegiatan penggunaan dana, yaitu aktivitas pada saat mengalokasikan atau menginvestasikan modal koperasi, baik dalam bentuk modal kerja maupun investasi aktiva tetap.
- d) Prinsip ekonomi, adalah suatu prinsip yang dijadikan dasar dalam berbagai kegiatan ekonomi, yang terdiri dari:
 - 1) Rasionalitas, yaitu suatu tindakan yang penuh dengan perhitungan ekonomis sesuai dengan tujuan.
 - 2) Efisiensi, yaitu suatu penghematan penggunaan sumber daya ekonomis
 - 3) Efektivitas, yaitu suatu pencapaian target dari output atau tujuan yang akan dicapai.
 - 4) Produktivitas, yaitu suatu pencapaian output atas input yang digunakan.
- e) Prinsip koperasi dan aturan lainnya, yaitu suatu aturan main yang berlaku dalam koperasi, yang dimaksudkan disini adalah prinsip-prinsip koperasi sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya serta aturan-aturan lainnya yang berlaku pada masing-masing Koperasi.

Salahsatu yang menjadi bagian dari manajemen keuangan koperasi seperti diungkapkan diatas adalah gambaran bahwa dalam koperasi juga diperlukan adanya modal. Walaupun dikatakan koperasi bukan sebagai perkumpulan modal melainkan perkumpulan orang-orang, akan tetapi tak dapat dipungkiri bahwa modal merupakan faktor utama yang akan dapat

mendorong upaya-upaya mensejahterakan anggota. Dengan demikian modal dalam koperasi merupakan salahsatu faktor penting dan perlu dikelola secara baik dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen keuangan.

Terkait dengan masalah modal, maka akan menjadi tugas pengurus koperasi untuk melakukan langkah-langkah dalam mendapatkan modal/dana dan menggunakannya seefisien dan seefektifkan mungkin. Optimalisasi penggunaan dana merupakan cara untuk mencapai tujuan manajemen keuangan dalam koperasi, optimalisasi penggunaan modal akan dapat memaksimisasi profit atau SHU dan pada gilirannya nanti akan dapat memaksimisasi kesejahteraan anggota koperasi. Karena ketika SHU meningkat dan kesejahteraan anggota yang meningkat akan menambah kepercayaan para pihak ketiga (kreditur) terhadap koperasi. Dengan didapatnya kepercayaan tersebut, maka koperasi memiliki peluang untuk dipercaya mengelola modal yang lebih besar lagi.

Perlu diingat dengan seksama, bahwa hubungan manajemen keuangan dengan berbagai kegiatan usaha koperasi atau pembelanjaan merupakan fungsi pokok yang harus mendapat perhatian. Dalam hal ini, maka pihak pengurus atau manajemen koperasi harus mengarahkannya pada:

- 1) Terwujudnya stabilitas usaha dengan cara pengelolaan likuiditas dan solvabilitas yang baik.
- 2) Terwujudnya pendayagunaan modal yang optimal
- 3) Terwujudnya kemampuan membentuk modal sendiri.

Ketiga hal di atas merupakan bagian dari indikator kinerja keuangan dan usaha pada suatu koperasi, suksesnya pengurus koperasi mewujudkan ketiganya, artinya pengurus telah mencapai kinerja keuangan yang baik. Sebaliknya, apabila pengurus gagal mewujudkan ketiga hal tadi, berarti kinerja pengurus dinilai buruk. Masalah pertama dari ketiga hal di tersebut atas, adalah gambaran yang diperoleh melalui analisa rasio keuangan dari laporan keuangan koperasi. Kemudian pada masalah kedua, menyangkut manajemen keuangan koperasi, masalah manajemen keuangan ini tentunya menuntut pengurus untuk memikirkan bagaimana kedua aktivitas (mencari sumber modal dan menggunakan modal) dapat dilakukan dengan baik. Sementara dari segi pengelolaan permodalan, koperasi sebagai badan usaha harus melakukannya dengan perhitungan yang rasional, berdasarkan setiap rencana usaha pada studi kelayakan. Perlakuan tersebut akan memacu pengelola koperasi untuk selalu berfikir ekonomis sejak awal berdiri, sehingga secara makro kriteria keberhasilan koperasi dapat diukur dengan menggunakan alat berupa analisa rasio keuangan. Melalui pengukuran tersebut akan bisa diketahui efisiensi pada koperasi, sehingga tingkat efisiensi ini bisa menentukan pencapaian

SHU Koperasi. Sementara pada masalah ketiga, pada hakekatnya merupakan wujud dari keberhasilan pengurus koperasi dalam memecahkan masalah kedua, masalah ketiga ini didasarkan atas prinsip bahwa koperasi itu harus mandiri dan tangguh. Jadi pada dasarnya semakin tinggi tingkat efisiensi maka SHU akan meningkat, dan peningkatan SHU dengan sendirinya akan meningkatkan pula pembentukan modal sendiri yang dibentuk melalui cadangan.

Ketiga masalah sebagaimana tersebut diatas menjadi tugas bagi pengelola koperasi (pengurus berserta manajer) untuk dapat menciptakan serta menstrategikan ketiga kondisi yang menjadi arah dari perkembangan manajemen keuangan koperasi. Maka dalam hal ini pengelola harus dapat menciptakan suatu kondisi optimal dalam koperasi, antara lain dapat dilakukan melalui:

- 1) Optimalisasi skala usaha koperasi, melalui alokasi modal yang efisien, produktif dan rasional;
- 2) Optimalisasi pemanfaatan kapasitas usaha dan modal koperasi;
- 3) Optimalisasi kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam bentuk usaha, permodalan maupun manajemen koperasi secara umum;
- 4) Optimalisasi pemupukan modal sendiri, melalui simpanan-simpanan anggota dan pembentukan dana cadangan.

Supaya usaha-usaha optimalisasi di atas dapat tercapai, maka sudah seharusnya kesan yang selama ini ada bahwa "Koperasi sebagai perkumpulan orang bukan perkumpulan modal" dimana seringkali itu dianggap sebagai salah satu faktor penyebab gagalnya manajemen keuangan koperasi dapat dihapuskan stigmanya. Tentu saja hal ini menjadi tugas yang berat bagi pengelola koperasi dalam menjalankan aktivitas usaha koperasinya tersebut, namun dengan kapasitas pengurus yang terus dibina dan upgrade pengetahuan serta kemampuannya, bukan tidak mungkin sasaran tujuan koperasi dapat tercapai dengan maksimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penyusunan laporan keuangan koperasi yang dibuat oleh pengurus koperasi merupakan upaya untuk mendapatkan informasi yang merangkum semua aktivitas pelaksanaan kegiatan arus lalu lintas keuangan koperasi selama satu tahun. Sedangkan analisa terhadap laporan keuangan koperasi dilakukan untuk memperoleh gambaran terkait likuiditas, aktivitas, solvabilitas serta profitabilitas sebagai bagian penting dari tugas pengurus terkait dengan manajemen keuangan untuk menunjukkan bahwa mengelola keuangan sebuah koperasi sangat terkait dengan keseluruhan aktivitas yang ada dalam koperasi itu sendiri. Dalam hal ini manajemen keuangan koperasi merupakan bagian dari manajemen koperasi, yang dalam

prakteknya dijalankan oleh pengurus dan diawasi oleh badan pengawas dan anggota. Pengawasan oleh anggota dipandang sebagai sebuah bentuk pengawasan yang paling efektif, hal ini dikarenakan identitas ganda yang dimiliki oleh anggota, yaitu sebagai pemilik koperasi sekaligus juga sebagai pengguna jasa/layanan koperasi.

Pengurus koperasi juga dituntut memiliki kemampuan untuk melakukan optimalisasi terhadap skala usaha koperasi, melalui alokasi modal yang efisien, produktif dan rasional; pemanfaatan kapasitas usaha dan modal koperasi; kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam bentuk usaha, permodalan maupun manajemen koperasi secara umum; dan pemupukan modal sendiri, melalui simpanan-simpanan anggota dan pembentukan dana cadangan.

Untuk mencapai optimalisasi di atas, maka sudah seharusnya stigma tentang "Koperasi sebagai perkumpulan orang bukan perkumpulan modal" yang ternyata seringkali itu dianggap sebagai salah satu faktor penyebab gagalnya manajemen keuangan koperasi dapat dihapuskan. Tentu saja hal ini menjadi tugas yang berat bagi pengelola koperasi dalam menjalankan aktivitas usaha koperasinya tersebut, namun dengan kapasitas pengurus yang terus dibina dan upgrade pengetahuan serta kemampuannya, bukan tidak mungkin sasaran tujuan koperasi dapat tercapai dengan maksimal.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, Kamaruddin (2004), *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, cetakan pertama, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Anoraga, P. dan Widiyanti, N. 2000. *Manajemen Koperasi Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya
- Budiwati, N. dan Susanti L. 2007. *Manajemen Keuangan Koperasi*. Bandung
- Budiwati, Neti dan Lizza Suzanti. (2007). *Manajemen Keuangan Koperasi*. Bandung: Laboratorium Koperasi.
- Gitosudarmo, I, dan Basri (2002), *Manajemen Keuangan*, cetakan pertama, Edisi Keempat Yogyakarta : BPFE.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 2008. *Pedoman Kebijakan Perpajakan bagi Koperasi Deputi Bidang Pembiayaan*. Sitio, Adan Tamban, H. 2001. *Koperasi Teori dan Praktek*, Jakarta: Erlangga.
- Marbun, B.M (2003), *Kamus Manajemen*, Cetakan Pertama, Jakarta : CV Mulya Sari.
- Munawir, S. (2004), *Analisa Laporan Keuangan*, Edisi Keempat, Yogyakarta : Liberty.
- Riyanto, Bambang. (1995). *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE.

Syamsuddin, Lukman (2000), *Manajemen Keuangan Perusahaan*, Cetakan Lima, Edisi Baru, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Tamzil Yusuf, Stepanus Dedy Deomede, Dwi Susilowati. Peningkatan Kualitas Sistem Pelaporan Manajemen Keuangan Koperasi. *Jurnal Abdi Masyarakat Ilmu Ekonomi*. ISSN : 2656-3908. Vol. 1 No. 1 (2018) retrieved from <http://jurnal.fem.uniba-bpn.ac.id/index.php/JAMIE/article/view/39>

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian